



MAM SUKAMTO (TEMPO)

Gedung Baru DPR

Peneliti dari Transparency International Indonesia, Heni Yulianto (kiri), dan peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam (kanan), memberikan keterangan pers di kantor TII, Jakarta, kemarin. Kedua lembaga itu meminta DPR membatalkan proyek pembangunan gedung baru DPR karena rakyat lebih membutuhkan dana tersebut untuk anggaran kesejahteraan.

Putusan MK Berpotensi Jadi Alat Barter Kekuasaan

Sekretariat Gabungan dinilai akan jadi batu sandungan.

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah persyaratan menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat dikhawatirkan akan dijadikan alat oleh sejumlah partai untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan. Sebab, jalan menuju pemakzulan presiden dan wakil presiden dalam kasus Bank Century kini harus lewat suara partai.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyadari kelanjutan kemudahan hak menyatakan pendapat akan dikembalikan kepada sikap partai politik. Menurut dia, pemakzulan bisa dilakukan

bila partai yang sebelumnya mendukung opsi C (*bailout* Bank Century bermasalah) tetap memegang teguh keputusannya.

“Namun, jika orientasi partai adalah barter kekuasaan, maka habislah,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Bambang mengatakan ada kemungkinan penguasa berusaha menghentikan upaya penggulingan lewat hak menyatakan pendapat angket Century. Salah satunya, kata dia, bisa saja lewat jualan posisi menteri.

“Saya melihat memang erat hubungannya isu putusan MK ini dengan *reshuffle*,” ujar Bambang.

Dia pesimistis kasus Bank Century akan selesai lewat proses hukum. “KPK dan Jaksa Agung serta polisi hanya akrobat hukum,” kata dia.

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, Sekretariat Gabungan Partai Koalisi akan menjadi penghambat penyelesaian kasus Century, termasuk bila kasus itu diselesaikan lewat hak menyatakan pendapat di DPR. “(Kasus) Century mati suri ketika Setgab terbentuk,” ujarnya.

Dia juga sadar para politikus dalam kasus Century terkurung dalam keputusan fraksi, terlebih setelah adanya Sekretariat Gabungan. “Kami ini memang jadi seolah-olah kritis,” kata dia.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Sekretariat Gabungan akan menjadi batu sandungan besar untuk mewujudkan hak menyatakan pendapat dalam penyelesaian kasus Century.

Menurut dia, putusan MK

tersebut bakal dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan, terutama bagi elite partai yang ada di dalam koalisi. “Setgab bakal menjadi gelanggang barter itu,” ujarnya.

Namun, kata Burhanuddin, semua fraksi saat ini sedang saling intip. Hanya Fraksi Hanura yang sudah jelas sikapnya akan menggunakan hak menyatakan pendapat dalam penyelesaian skandal Century. “Bola lain berada di PDIP,” katanya.

Burhanuddin juga menilai, saat ini politikus yang pernah menjadi inisiator hak angket Century sedang terjepit. Sebab, secara psikologis anggota DPR sekarang ini masih bergantung pada keputusan fraksi. “Masih berkiblat dan masih bisa disragamkan oleh fraksinya,” kata dia. ● SANDY INDRAPRATAMA

Gelar Raja Batak untuk SBY Ditolak

MEDAN — Sekitar 200 pemuda dan pemudi Batak menentang rencana pemberian gelar Raja Batak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin.

Massa yang mengatasnamakan Partungkuoan Naposo Bangsa Batak itu memulai aksi damai di Gereja HKBP, Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara, dan diakhiri di Tugu Sisingamangaraja XII, Jalan SM Raja.

Mereka menuding rencana itu sebagai bentuk politisasi oleh Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Riko Sihombing, salah seorang pengunjung rasa, menduga rencana pemberian gelar itu merupakan rangkaian dari peresmian Museum Batak di Kota Balige, Kabupaten Toba Samosir, oleh Presiden besok. “Jangan Raja Batak ini dipolitisasi,” kata Riko saat dihubungi kemarin.

Riko mengklaim para pengunjung rasa tersebut adalah keturunan raja-raja di Tanah Batak, yakni dari Kabupaten Toba, Toba Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. “Aksi serupa akan kami lakukan Senin (hari ini) di DPRD Sumatera Utara dan Kota Medan,” ujarnya.

Menurut Riko, mereka menentang pemberian gelar itu karena tidak ada bukti perbuatan Presiden Yudhoyono dalam menyejahterakan Tanah Batak. “Kecuali (Presiden) telah membikin Tanah Batak ini sejahtera,” ujarnya.

Raja Batak yang nyata, kata dia, adalah Sisingamangaraja XII. “Karena itu, kami berunjuk rasa di sana (tugu).”

Guru besar antropologi Universitas Negeri Medan, Usman Pelly, berpendapat, raja di kalangan Batak berbeda dengan raja di Jawa. “Kalau di Jawa, raja itu memiliki perangkat, keraton (kerajaan), wilayah, dan pasukan,” katanya.

Di Batak, ujar Usman, raja lebih kepada kualitas orang tersebut. “Raja itu, substansinya di kalangan Batak, kualitas dirinya. Spiritual dan menjadi imam,” ujarnya. Sehingga aksi protes terhadap rencana pemberian gelar itu, kata Usman, hal yang wajar.

Penggagas pembaruan Museum Batak di Balige, T.B. Silalahi, mengaku heran atas kontroversi rencana pemberian gelar raja Batak kepada Presiden Yudhoyono. “Batak itu enggak punya raja,” ujarnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan Presiden Yudhoyono akan dianugerahi gelar Patuan, setara dengan pangeran, dari puak Angkola. Menurut dia, gelar itu diberikan karena Yudhoyono adalah tokoh yang dihormati, yang akan meresmikan Museum Batak.

Menurut dia, itu adalah praktek yang lazim dilakukan lembaga adat Angkola bagi orang-orang terhormat. “Menteri saja dikasih, apalagi presiden,” ucapnya.

Meski rencana itu mendapat protes, T.B. Silalahi tak berencana membatalkannya. “Apa ada (orang Batak) yang dari Angkola memprotes? Mereka yang memprotes enggak mengerti, dibilang mengangkat raja,” tuturnya.

● SOETANA MONANG HASIBUAN | BUNGA MANGGIASIH

Menteri Kesehatan Sakit Kanker Paru-paru

JAKARTA — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menderita sakit kanker paru-paru. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan, Bambang Sulistomo, mengatakan Endang diketahui menderita kanker paru-paru setelah menjalani *general checkup* rutin sekitar Oktober dan November tahun lalu.

“Benar, memang dideteksi seperti itu. Jenis penyakitnya kanker paru-paru,” kata Bambang saat dihubungi kemarin.

Kabar itu mengagetkan karena

Endang selama ini tak menunjukkan gejala-gejala sakit. Endang juga memiliki gaya hidup sehat, seperti tak merokok dan rutin berolahraga.

Bambang mengatakan Endang beberapa kali berobat di Guangzhou, Cina, dan secara rutin melakukan kontrol ke dokter di dalam negeri. “Sekali kunjungan ke Cina 4-5 hari saja,” tuturnya.

Menurut Bambang, sejauh ini penyakit yang diderita Endang dapat diatasi dan ia pun masih bisa bekerja seperti biasa. Endang tetap memimpin rapat rutin di Kementerian,

dan aktivitasnya tak berkurang.

Bambang tidak mengetahui secara terperinci sejauh mana perkembangan kondisi kesehatan Endang. Ia juga tak tahu apakah penyakit kanker yang dideritanya sudah memasuki stadium IV. “Berapa pun stadiumnya, yang pasti penyakit sudah bisa diatasi,” katanya.

Dia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah dikabarkan perih kondisi kesehatan Endang sejak November tahun lalu. Presiden, kata dia, mendukung proses penyembuhan Endang. Tim dok-

ter kepresidenan ikut melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Murti Utami membantah kabar bahwa Endang menderita kanker paru-paru stadium IV. “Saya enggak dengar seperti itu, saya lihat Ibu Menteri sehat-sehat saja,” ujar Murti melalui sambungan telepon kemarin.

Menurut Murti, selama ini Endang masih kerap memimpin rapat, dan belum lama ini Endang mendampingi Wakil Presiden Boediono ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Namun anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadilah Supari, menyatakan pernah mendengar kabar dari para koleganya sesama dokter bahwa Endang menderita kanker. Namun ia mengaku tak tahu detailnya.

Jika kabar itu benar, kata Siti, selama Endang masih menunjukkan kinerja baik, tak perlu ada pengantian Menteri Kesehatan. “Waktu zaman dulu ada (menteri) yang operasi jantung, juga tidak apa-apa,” kata mantan Menteri Kesehatan ini.

● AQIDA SWAMURTI | BUNGA MANGGIASIH